

# **Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan**

**Drs. Bram Christanto, MA**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,UNTAG Semarang**  
[christanto.bram@yahoo.com](mailto:christanto.bram@yahoo.com)

## **Abstraksi**

Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan adalah salah satu desa yang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Kami menyoroti tentang Keberhasilan PNPM mandiri Pedesaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di desa tersebut. Secara teori, program dikatakan berhasil dapat di ukur dari seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat.

Desa Gundi yang terletak sekitar 17 km dari ibukota kabupaten mempunyai keadaan demografi yang beraneka ragam, dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian serta tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi yang masih rendah diharapkan program PNPM dapat memberi dampak yang positif dan dapat mensejahterakan masyarakat setempat.

PNPM Mandiri Pedesaan adalah program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan.

Setelah kami melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka dan kuesioner dengan teknik sensus terhadap 33 responden yang merupakan anggota kelompok SPP, kami memperoleh hasil yang tidak signifikan. Ini mungkin dikarenakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih kurang sehingga mempengaruhi hasil perhitungan kami.

Dengan hasil penelitian kami, semoga menjadi perhatian pemerintah maupun semua elemen yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Pedesaan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan.

Kata kunci : PNPM, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan, Pedesaan.

## **1. Pendahuluan**

Saat ini di Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi nasional disegala bidang, dimana pembangunan merupakan usaha untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar kedamaian abadi dan kesejahteraan sosial.

Tujuan utama rangkaian pembangunan, baik pembangunan nasional maupun daerah adalah pembangunan yang bukan hanya diarahkan pada pembangunan fisik saja melainkan juga mengupayakan perbaikan tingkat

kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari 3 aspek yang merupakan tolak ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan. Keempat aspek tersebut adalah aspek kesehatan, pendidikan dan perumahan.

Aspek kesehatan merupakan indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesehatan yang tinggi akan dicapai jika seluruh atau sebagian besar masyarakat bisa menjangkau sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Dengan banyaknya masyarakat yang sehat berarti tingkat kesejahteraannya sudah semakin membaik.

Aspek pendidikan juga memegang peranan yang sangat penting karena melalui pendidikan dapat ditentukan sejauh mana masyarakat akan berkembang. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat dalam mencapai hidup sejahtera.

Selain kedua aspek diatas, ukuran untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat

dapat dilihat juga dari aspek rumah, fasilitas, pendapatan, kepemilikan lahan, kepemilikan ternak, kepemilikan kendaraan, pola makan dan status kepemilikan. Kualitas fisik bangunan yang memadai juga merupakan aspek penentu dari sejahtera atau tidaknya masyarakat suatu daerah.

Masyarakat akan sejahtera jika seluruh aspek diatas bagus, karena seluruh aspek tersebut dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Selain itu pembangunan yang merata pada segala bidang pada masing-masing daerah juga penentu dari sejahtera atau tidaknya masyarakat suatu daerah. Keluarga Prasejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) yang ada di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dapat di golongan sebagai berikut :

Tabel I.1  
Data keluarga sejahtera di Dusun : RW 1

| No     | RT   | K.P.S | K.S<br>I | K.S<br>II | K.S<br>III | Jumlah |
|--------|------|-------|----------|-----------|------------|--------|
| 1      | RT 1 | 8     | 15       | 10        | 7          | 40     |
| 2      | RT 2 | 20    | 9        | 6         | -          | 35     |
| 3      | RT 3 | 11    | 9        | 2         | 3          | 25     |
| 4      | RT 4 | 15    | 21       | 8         | 3          | 47     |
| 5      | RT 5 | 5     | 9        | 3         | 4          | 21     |
| 6      | RT 6 | 10    | 6        | 6         | 1          | 23     |
| 7      | RT 7 | 21    | 9        | 3         | -          | 33     |
| Jumlah |      | 90    | 78       | 38        | 18         | 224    |

Tabel I.2  
Data keluarga sejahtera di Dusun : RW II

| No     | RT   | K.P.S | K.S<br>I | K.S<br>II | K.S<br>III | Jumlah |
|--------|------|-------|----------|-----------|------------|--------|
| 1      | RT 1 | 10    | 13       | 2         | 2          | 27     |
| 2      | RT 2 | 12    | 25       | 6         | 4          | 47     |
| 3      | RT 3 | 13    | 6        | 8         | -          | 27     |
| 4      | RT 4 | 12    | 17       | 12        | 1          | 42     |
| 5      | RT 5 | 7     | 5        | 13        | 2          | 27     |
| 6      | RT 6 | 10    | 16       | 10        | 2          | 38     |
| 7      | RT 7 | 12    | 7        | 4         | 1          | 25     |
| Jumlah |      | 76    | 89       | 55        | 12         | 233    |

Sumber : Data kesejahteraan desa Gundi Tahun 2011

Didalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan terdapat Undang – undang, Peraturan dan Keputusan Presiden/ Menteri Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- Undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

- PP No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa
- PP No.2 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
- PP No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Perpres No.54 Th 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- UU No.14 Th 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- PP No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- PTO PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2008 Untuk mencapai tujuan nasional, pembangunan nasional harus dilaksanakan di segala sektor kehidupan bangsa. Sektor-sektor pembangunan tersebut antara lain sektor politik, sektor ekonomi, sektor budaya, sektor hukum, sektor ilmu pengetahuan dan teknologi serta sektor keamanan. Guna mencapai semuanya itu diperlukan peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan kebijakan publik di bidang kesejahteraan (*publik welfare*) (Edi Suharto : 2007). Pembangunan nasional dapat diwujudkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Program Keluarga Berencana, pengucuran dana Inpres pendidikan, kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi. Ada berbagai program yang berskala nasional yang bertujuan untuk melakukan intervensi bagi penanggulangan masalah kemiskinan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan masyarakat di pedesaan, dan juga untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Selain Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 juga mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM MANDIRI) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Pendekatan PNPM MANDIRI merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Sasaran program ini adalah kecamatan-kecamatan yang dinilai paling miskin di Indonesia diantaranya Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan termasuk salah satu yang masuk dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI) karena lapisan masyarakatnya yang beragam dari mulai PNS, pegawai swasta, petani, buruh dan pedagang yang kesemuanya itu mempunyai kebutuhan hidup, akan tetapi lahan pertanian dalam desa tersebut tidak begitu dapat memberikan hasil sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sekian banyak profesi diatas maka pekerjaan yang paling dominan untuk usaha mereka adalah berdagang sehingga untuk usaha tersebut mereka meminjam pada bank sebagai modal awal dan juga untuk memajukan usaha kecil mereka demi meningkatkan taraf ekonomi untuk hidup yang lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, usaha kecil perlu diberdayakan dalam memanfaatkan peluang kerja dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang. Yang dimaksud dengan usaha kecil sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil adalah “usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Banyak masyarakat desa Gundi yang berdagang kecil-kecilan terlebih lagi kaum perempuan atau ibu-ibu. Berdagang dilakukan guna membantu perekonomian keluarga supaya dapat mencukupi kehidupan sehari-hari.

Dengan suku bunga yang lebih rendah daripada bank, diharapkan dapat membantu masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup serta menunjang perekonomian negara dan juga yang menjadi daya tarik penulis adalah adanya sistem *Tanggung-Renteng* apabila terjadi *wanprestasi* juga pinjaman tersebut hanya dikhususkan kepada kaum perempuan saja. Namun dalam prakteknya tidak selalu berjalan mulus dalam setiap pengeluaran dari suatu program, terlebih lagi yang berhubungan dengan uang. PNPM-MD SPP banyak

mengalami hambatan dan kendala dalam hal pengembalian uang dari para nasabah atau peminjam antara lain :

1. Pengembalian telat atau tidak sesuai dari jadwal yang ditentukan dalam musyawarah
2. Nasabah tidak mau membayar atau karena belum ada uang.

Di Desa Gundi kecamatan Godong kabupaten Godong terdapat 4 kelompok SPP yaitu sebagai berikut :

Tabel I.3  
Data Kelompok SPP

| No.    | Nama Kelompok   | Jumlah Penerima | Modal         |
|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1      | Yasinan Rt 02/1 | 9 orang         | Rp 13.500.000 |
| 2      | Yasinan Rt 04/2 | 9 orang         | Rp 9.000.000  |
| 3      | Arisan Rt 03/2  | 7 orang         | Rp 7.000.000  |
| 4      | Yasinan Rt 01/1 | 8 orang         | Rp 16.000.000 |
| Jumlah |                 | 33 orang        | Rp 45.500.000 |

Sumber : Data kesejahteraan desa Gundi Tahun 2011

Penulis disini mencoba melakukan penelitian karena program ini adalah untuk Desa yang memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu: kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural dan kesenjangan antar wilayah. Sedangkan persoalan pengangguran lebih di picu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan.

Sedangkan perumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gundi?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gundi.

## 2. Kerangka Teori

### 2.1. Program PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri adalah sebuah kerangka atau wadah yang memberikan pedoman dan mengatur agar program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara harmonis dan berkelanjutan. Karena

PNPM Mandiri hanyalah kerangka dan wadah bagi program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, tim pengendali menginginkan agar tidak hanya program pemerintah saja yang dapat tergabung dalam PNPM Mandiri, namun seluruh program-program sejenis baik dari swasta, LSM baik lokal maupun internasional dapat tergabung. Program-program yang saat ini tergabung dalam kerangka PNPM Mandiri adalah :

### 1) Program Pengembangan Kecamatan

PPK dimulai pertama kali ketika Indonesia mengalami krisis multidimensi dan perubahan politik pada 1998. Program pemberdayaan masyarakat terbesar di Indonesia dari segi serapan dana, cakupan wilayah, kegiatan yang dihasilkan dan jumlah pemanfaatnya ini berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Pembiayaan program berasal dari alokasi APBN, APBD, dana hibah lembaga/ negara pemberi bantuan, serta pinjaman dari Bank Dunia.

PPK menyediakan dana bantuan secara langsung bagi masyarakat secara hibah/Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sekitar Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar per kecamatan. Jumlah pemberian tersebut bergantung pada jumlah penduduk. PPK memusatkan kegiatannya pada masyarakat perdesaan Indonesia yang paling miskin. Fase pertama PPK (PPK I) dimulai pada 1998/1999 sampai 2002, fase kedua (PPK II) dimulai pada 2003 dan berlangsung hingga 2006, sedang fase ketiga (PPK III) telah dimulai pada awal 2006. Pemerintah Pusat menilai bahwa pelaksanaan program yang mengusung sistem pembangunan *bottom up planning* ini sebagai program yang berhasil, maka Pemerintah berkeinginan untuk melanjutkan upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dalam skala yang lebih luas, salah satunya dengan menggunakan skema PPK.

Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), per 1 September 2006. Program

tersebut kemudian berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) dan diluncurkan Presiden di Kota Palu, 30 April 2007.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat upaya mengentaskan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri merupakan penyelarasan nama dari mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998.

Program pemberdayaan masyarakat ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di perdesaan dengan menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat, sebesar Rp1 miliar sampai Rp3 miliar per kecamatan. Serupa dengan PPK, dalam PNPM Mandiri Perdesaan seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tetap berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri, dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia.

## 2) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dimulai pada tahun 1999 sebagai upaya pemerintah dalam membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini dilaksanakan dengan menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan.

Sejak pelaksanaan P2KP-1 hingga pelaksanaan P2KP-3 saat ini telah terbentuk sekitar 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 kecamatan di 235 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta telah mencakup 18,9 Juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 243.838 KSM.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2007 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai tahun tersebut PNPM Mandiri P2KP diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs)<sup>1</sup> sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015.

Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan<sup>2</sup>. P2KP ini dalam pelaksanaannya berada dibawah tanggung jawab Departemen Perkerjaan Umum cq Ditjen Cipta Karya.

## 3) Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)

Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) adalah program Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan daerah tertinggal dan khusus untuk meningkatkan kapasitas sosial ekonomi daerah dengan mengembangkan kapasitas pemerintah kabupaten dalam memperkuat perencanaan partisipatif sebagai jalan menuju proses pembangunan yang normal dan secara operasional dapat mendorong terjadinya pendekatan yang efektif secara multi sektor.

Lokasi yang menjadi sasaran untuk penerapan P2DTK adalah kabupaten-kabupaten yang telah ditetapkan dalam Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/Kep/M-PDT/02/2005 yang meliputi:

### a. Daerah Tertinggal:

Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

### b. Daerah Khusus dan Perbatasan:

Adalah kabupaten yang mengalami bencana alam, bencana sosial serta daerah yang ada di perbatasan dengan Negara lain.

## 2.2. Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Wilayah (PISEW)

Pada tahun 1994, pemerintah mengeluarkan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang kemudian menjadi pelopor dari lahirnya program-program lain, seperti Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D), dan Proyek Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD).

Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah/Regional Infrastructure for Social and Economic Development (RISE) yang kemudian disebut dengan PISEW adalah sebuah program yang

merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari P2D dan pilot project PKP2D dan penyesuaian terhadap berbagai isu dan aktual yang berkembang saat ini, termasuk di dalamnya menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. PISEW merupakan salah satu upaya pemerintah dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) untuk mengatasi kesenjangan antar-wilayah, kemiskinan dan pengangguran melalui Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat. Selain itu, dalam PISEW juga dilakukan penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Project Implementing Unit dalam pelaksanaan PISEW adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri.

### 2.3. Cara kerja PNPM Mandiri

#### Pedesaan

PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perdesaan melalui tahapan-tahapan kegiatan berikut:

- a. Sosialisasi dan penyebaran informasi program.
- b. Proses Partisipatif Pemetaan Rumahtangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial.
- c. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan.
- d. Seleksi/ Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan.
- e. Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka.
- f. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan.

### 2.4. Sasaran program PNPM Mandiri

#### Pedesaan

- a. Rumah Tangga Miskin ( RTM ) di Pedesaan
- b. Kelembagaan Masyarakat di Pedesaan
- c. Kelembagaan Pemerintahan Lokal

### 2.5. Keberhasilan PNPM Mandiri

#### Pedesaan

Keberhasilan PNPM Mandiri adalah keberhasilan suatu aktifitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan dan target, sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dan apabila tujuan dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya, dikatakan berhasil dan sebaliknya apabila tujuan dan target tidak dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya maka aktifitas itu dikatakan tidak berhasil.

1) Variabel Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan dengan indikator :

- a. Kualitas, indikator ini menunjukkan standar kualitas dari kegiatan Simpan pinjam perempuan.
- b. Kuantitas, merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh anggota kelompok selama mengikuti kegiatan SPP tersebut.
- c. Dampak, indikator ini melihat apakah kegiatan SPP yang dilakukan benar-benar memberikan perubahan di masyarakat. Melalui jenis usaha yang dijalankan.
- d. Waktu, yang merupakan ketepatan waktu kelompok SPP dalam melaksanakan kegiatan SPP tersebut selama 1 tahun.

Ciri - ciri keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan

- a. tingginya keterlibatan warga miskin dan perempuan dalam pelaksanaan program;
- b. tersedianya lapangan kerja;
- c. mulai terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa/antar desa;
- d. terjadi peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam pembangunan partisipatif;
- e. berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri bagi masyarakat;
- f. terlembaganya pengelolaan dana bergulir.

## 2.6. Konsep Tingkat Kesejahteraan

### Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Untuk mengetahui masyarakat sudah sejahtera atau tidak dapat di lihat dari beberapa aspek/indikator, yaitu dalam aspek kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan perumahan. Apabila keempat aspek tersebut sudah dapat di jangkau masyarakat, berarti masyarakat sudah sejahtera.

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan. Kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan secara agregat.

Kesejahteraan bersifat kompleks karena multidimensi, mempunyai keterkaitan antardimensi dan ada dimensi yang sulit direpresentasikan. Kesejahteraan tidak cukup dinyatakan sebagai suatu intensitas tunggal yang merepresentasikan keadaan masyarakat, tetapi juga membutuhkan suatu representasi distribusional dari keadaan itu.

PNPM Mandiri Pedesaan terbagi menjadi 2 yaitu pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik. Di dalam penelitian ini yang di teliti adalah pembangunan nonfisik yaitu kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Untuk mengetahui keberhasilan PNPM perlu melakukan evaluasi dengan melihat indikator dari kualitas, kuantitas, dampak, dan waktu. Sehingga Keberhasilan PNPM dapat di lihat dari kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

## 2.8. Hipotesa

Ada Pengaruh Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gundi.

## 3. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian penjelasan (*eksplanatory*)

Populasinya seluruh anggota kelompok simpan pinjam tersebar di Desa Gundi yang terdiri 4 kelompok dengan jumlah anggota 33 orang. Agar semua mendapat hak yang sama, maka peneliti menggunakan teknik sensus dalam pengumpulan data.

Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder, sedangkan Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, kuesioner dan wawancara. Analisa data secara kuantitatif maupun analisa data kualitatif, sedangkan untuk pengujian hipotesa digunakan teknik kolerasi *Product Moment*.

Rumus *Product Moment*, yaitu :

Rumus :

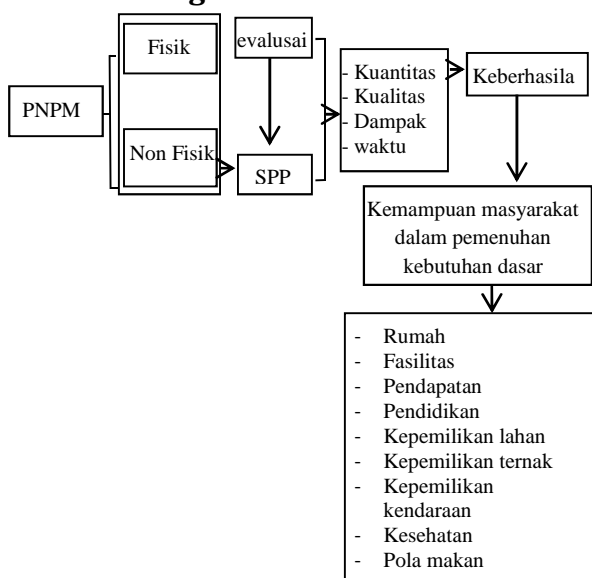
$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Dimana :

- $R_{xy}$  : koefisien Korelasi Product Moment
- X : nilai dari item (pertanyaan)
- Y : nilai dari total item
- N : banyaknya responden atau sampel penelitian

Hasil  $r_{xy}$  ini kemudian dikonsultasikan dengan r tabel untuk mengetahui taraf signifikan adalah sebagai berikut :

## 2.7. Kerangka Pikir



- $r_h \geq r_t$  1 % = sangat signifikan  
 $r_h \geq r_t$  5 % = signifikan  
 $r_h \leq r_t$  5 % = non signifikan

Dengan menggunakan rumus product moment seperti tersebut diatas diharapkan akan dapat diketahui apakah didalam hipotesa yang diajukan, ada saling pengaruh atau tidak diantara variabel-variabelnya. Kemudian dalam rangka melihat hasil uji hipotesa masih diperlukan suatu tes khusus dimana akan diketahui apakah hipotesa "diterima" atau "tidak" sehingga dapat diberikan perbaikan-perbaikan pada kesimpulannya.

Adapun konsep dasar yang merupakan tinjauan dari sudut pandang peneliti mengenai masalah pokok penelitian adalah :

1. Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan adalah Keberhasilan dalam bidang simpan pinjam yang secara umum dapat dilihat melalui kualitas, kuantitas, dampak dan waktu dalam melaksanakan kegiatan SPP.
2. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi yang menggambarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dll

Definisi Operasional

1. Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan diukur dengan indikator :
  - a. Kualitas, indikator ini menunjukkan standar kualitas dari kegiatan Simpan pinjam perempuan. Misalnya, apakah pelayanan kegiatan simpan pinjam perempuan sudah memenuhi syarat dalam hal keramahan, koresponsifan, dan sikap empati terhadap kelompok Simpan pinjam perempuan.
  - b. Kuantitas, merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh anggota kelompok selama mengikuti kegiatan SPP tersebut.
  - c. Dampak, indikator ini melihat apakah kegiatan SPP yang dilakukan benar-benar memberikan perubahan di masyarakat. indikator ini melihat apakah kegiatan SPP yang dilakukan benar-benar memberikan perubahan di masyarakat. Melalui jenis usaha yang dijalankan.
  - d. Waktu, yang merupakan ketepatan waktu kelompok SPP dalam

melaksanakan kegiatan SPP tersebut selama 1 tahun.

2. Tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indikator : Terpenuhinya kebutuhan dasar dalam bidang
  - a. Rumah
  - b. Fasilitas
  - c. Pendapatan
  - d. Pendidikan
  - e. Kepemilikan lahan
  - f. Kepemilikan ternak
  - g. Kepemilikan kendaraan
  - h. Kesehatan
  - i. Pola makan
  - j. Status kepemilikan

## 4. Hasil Penelitian

### 4.1. Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan

Keberhasilan di dalam PNPM Mandiri dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu dari segi kualitas, kuantitas, dampak dan waktu. Dari segi kualitas dapat dilihat dari pelayanan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan apakah sudah memenuhi syarat dalam hal keramahan, koresponsifan, dan sikap empati dalam kelompok simpan pinjam perempuan.

#### 1. Kualitas

Dari tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu 66,7 % menyatakan sangat ramah. Jadi dapat dikatakan bahwa sikap pengelola PNPM Mandiri maksimal dalam melayani anggota dalam kegiatan SPP di Desa Gundi.

Dari tabel 2 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu 54,54 % menyatakan cepat tanggap. Jadi dapat dikatakan bahwa pengelola SPP cepat tanggap dalam melayani anggota SPP pada saat membayar angsuran.

#### 2. Kuantitas

Dari tabel 3 terlihat bahwa sebagian besar responden mempunyai penghasilan >Rp 1.100.000 yaitu sebanyak 57,57%. Jadi dapat dikatakan bahwa responden sudah termasuk keluarga yang sejahtera.

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 45,45% pendapatannya meningkat sebanyak 6 –



10%. Jadi dapat dikatakan bahwa sebagian responden dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan adanya tingkatan pendapatan.

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 51,51% mendapatkan modal pinjaman dari kelompok SPP sebesar >Rp 1.500.000. Dengan adanya modal awal ini diharapkan mampu membuka usaha.

### 3. Dampak

Dari tabel 6 dapat di lihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 90,90% sangat dapat mengembangkan usaha dengan modal pinjaman dari kegiatan SPP. Dengan adanya pengembangan usaha tersebut maka dapat meningkatkan penghasilan bagi keluarga.

Dari tabel 7 dapat di lihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 90,90% cukup dapat membuka usaha baru dengan modal pinjaman dari kegiatan SPP. Dengan adanya usaha baru tersebut maka dapat meningkatkan penghasilan bagi keluarga. Dengan penghasilan yang meningkat maka kesejahteraan keluarga tersebut juga meningkat.

Dari tabel 8 dapat di lihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 66,67% tidak dapat menambah karyawan baru dengan modal pinjaman dari kegiatan SPP. Jadi penghasilan yang di peroleh responden tidak bisa memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

Dari tabel 9 dapat di lihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 60,60% tidak dapat menambah barang dagangan baru dengan modal pinjaman dari kegiatan SPP. Jadi penghasilan yang di peroleh responden tidak akan bertambah karena barang dagangan yang dimiliki tetap tidak ada tambahan.

### 4. Waktu

Dari tabel 10 dapat di lihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 57,57% lama keanggotaan 3 – 4 tahun. Jadi di desa gundi peminat menjadi kelompok SPP sangat besar.

Dari tabel 11 dapat di lihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 84,84% tidak pernah menunggak dalam membayar angsuran. Jadi kesadaran pada diri

responden sangat tinggi sehingga membayar tepat waktu.

Dari tabel 12 dapat di lihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 100% menjawab sangat ada. Berarti responden tahu bila menunggak membayar angsuran akan dijatuhi sanksi.

Dari tabel 13 dapat di lihat bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 78,78% sangat tepat waktu dalam membayar angsuran. Jadi nilai kedisiplinan yang tertanam pada diri responden sangat ada.

Kemudian untuk mengetahui nilai rata-rata persentase Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, yaitu : 78,64 %. Untuk menentukan tinggi rendahnya hasil nilai rata-rata persentase Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan dapat ditentukan klasifikasi atau kategorinya yaitu antara :

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 67,00 % – 100,00 % | = Tinggi |
| 34,00 % – 66,00 %  | = Cukup  |
| 0 % – 33,00 %      | = Rendah |

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari nilai rata-rata prosentase Keberhasilan PNPM Mandiri di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan adalah termasuk dalam kategori tinggi yaitu antara 67,00% - 100%.

## 4.2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gundi

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Dengan kata lain lingkup substansi kesejahteraan seringkali dihubungkan dengan lingkup kebijakan sosial. Sebagai atribut agregat, kesejahteraan merupakan representasi yang bersifat kompleks atas suatu lingkup substansi kesejahteraan tersebut.

Kesejahteraan bersifat kompleks karena multidimensi, mempunyai keterkaitan antardimensi dan ada dimensi yang sulit direpresentasikan. Kesejahteraan tidak cukup dinyatakan sebagai suatu intensitas tunggal yang merepresentasikan keadaan masyarakat,

tetapi juga membutuhkan suatu representasi distribusional dari keadaan itu.

#### 1. Rumah

Dari tabel 14 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu 84,84% menggunakan batu sebagai pondasi untuk membangun rumah. Jadi sebagian besar masyarakat di desa gundi sudah termasuk keluarga sejahtera.

Dari tabel 15 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu 84,84% menggunakan genteng press sebagai atap rumah. Jadi sebagian besar masyarakat di desa gundi sudah termasuk keluarga sejahtera.

Dari tabel 16 terlihat bahwa ada nilai yang sama antara “tembok dan papan” dengan “papan” yaitu 48,48% . Jadi sebagian besar masyarakat di desa gundi sudah termasuk keluarga pra sejahtera jika dilihat dari bahan yang digunakan untuk membuat dinding rumah.

Dari tabel 17 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu 72,72% menggunakan tekel/ubin sebagai lantai rumah. Jadi sebagian besar masyarakat di desa gundi sudah termasuk keluarga pra sejahtera.

#### 2. Fasilitas yang ada di rumah

Dari tabel 18 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu 54,54% fasilitas yang ada di rumahnya sudah lengkap. Jadi sebagian besar masyarakat di desa gundi sudah termasuk keluarga sejahtera.

Dari tabel 19 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu 66,67% sudah menggunakan TV warna 14’ sebagai sarana hiburan di rumah. Jadi sebagian besar masyarakat di desa gundi sudah termasuk keluarga pra sejahtera.

Dari tabel 20 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu 60,60% menggunakan radio tape sebagai sarana hiburan di rumah. Jadi sebagian besar masyarakat di desa gundi sudah termasuk keluarga pra sejahtera.

#### 3. Pendapatan

Dari tabel 21 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu 42,42% mempunyai pendapatan antara Rp 400.000 – Rp 750.000. Jadi sebagian besar masyarakat di desa gundi sudah termasuk keluarga pra sejahtera.

#### 4. Kepemilikan lahan

Dari tabel 22 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu 81,81% mempunyai lahan seluas 10a - 1 ha. Jadi sebagian besar masyarakat di desa gundi sudah termasuk keluarga pra sejahtera apabila dilihat dari kepemilikan lahan.

#### 5. Kepemilikan ternak para responden

Dari tabel 23 terlihat bahwa seluruh responden yaitu 100% mempunyai 1 ekor ayam. Jadi sebagian besar masyarakat di desa gundi sudah termasuk keluarga pra sejahtera apabila dilihat dari kepemilikan ternak.

#### 6. Kepemilikan kendaraan

Dari tabel 24 terlihat bahwa sebagian besar responden yaitu 90,9% sudah mempunyai motor sebagai sarana transportasi. Jadi sebagian besar masyarakat di desa gundi sudah termasuk keluarga sejahtera apabila dilihat dari kepemilikan kendaraan.

#### 7. Sarana kesehatan

Dari tabel 25 terlihat bahwa seluruh responden yaitu 100% datang ke mantri kesehatan untuk berobat apabila sakit. Jadi sebagian besar masyarakat di desa gundi sudah termasuk keluarga sejahtera apabila dilihat dari sarana kesehatan yang digunakan.

#### 8. Pola makan

Dari tabel 26 terlihat bahwa seluruh responden yaitu 100% pola makanya 3x sehari menggunakan beras/jagung sebagai makanan pokok dan ikan sebagai lauk pauknya. Jadi sebagian besar masyarakat di desa gundi sudah termasuk keluarga sejahtera apabila dilihat dari pola makanya.

Untuk mengetahui nilai rata-rata persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, yaitu : 68,3 %, dan untuk menentukan tinggi rendahnya hasil nilai rata-rata persentase tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan klasifikasi atau kategorinya yaitu antara :

67,00 % – 100,00 % = Tinggi

34,00 % – 66,00 % = Cukup

00,00 % – 33,00 % = Rendah

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari nilai rata-rata prosentase Tingkat

Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan adalah termasuk dalam kategori tinggi yaitu 67,00% - 100%.

### 4.3. Pembahasan

Untuk mengetahui pengaruh Keberhasilan PNPM Mandiri pedesaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, peneliti menggunakan analisis tabel silang karena selain mengetahui sejauh mana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap 33 responden maka dapat di tampilkan beberapa tabel silang (V.1) Dari tabel silang tersebut dapat dianalisa bahwa :

Pendapatan kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sebelum mendapatkan pinjaman dari 33 responden terhadap pola makan sehari-hari menyatakan bahwa semua pendapatan kelompok SPP mulai dari <Rp 500.000 sampai dengan >Rp 1.100.000 pola makan sehari-hari nya sama yaitu 3x sehari menggunakan beras/jagung dengan lauk pauk ikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Desa Gundi Kecamatan Godong sudah memenuhi standar pola makan yang sehat dan bergizi. Apabila masyarakat memakan makanan yang sehat dan bergizi maka keluarga akan lebih cerdas dan cepat menyerap pelajaran di sekolah. Jadi ada pengaruh pendapatan sebelum mendapat pinjaman terhadap pola makan.

Dari tabel V.2 tersebut dapat dianalisa bahwa : Modal Awal yang diberikan kelompok SPP ( Simpan Pinjam Perempuan ) dari 33 responden terhadap pola makan sehari – hari menyatakan bahwa seluruh modal awal yang diberikan kelompok SPP mulai dari <Rp 1.000.000 sampai yang >Rp 1.500.000 pola makan sehari – hari nya sama yaitu 3x sehari menggunakan beras/jagung dengan lauk pauk ikan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Desa Gundi Kecamatan Godong sudah memenuhi standar pola makan yang sehat dan bergizi. Apabila masyarakat memakan makanan yang sehat dan bergizi maka keluarga akan lebih cerdas dan cepat menyerap pelajaran di sekolah. Jadi ada pengaruh modal awal yang diberikan kelompok SPP terhadap pola makan.

Dari tabel V.3 tersebut dapat di analisa bahwa: Sebagian besar kelompok SPP sangat dapat mengembangkan usahanya sehingga sebagian besar anggotanya mempunyai pendapatan

perbulan sekitar Rp 400.000 – Rp 750.000 yaitu sebanyak 14 responden. 9 responden sangat dapat mengembangkan usahanya sehingga mempunyai pendapatan Rp 800.000 keatas. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kelompok SPP sangat dapat mengembangkan usahanya sehingga pendapatannya dapat meningkat pula. Jadi ada pengaruh pengembangan usaha terhadap pendapatan perbulan kelompok SPP.

Dari tabel V.4 tersebut dapat dianalisa bahwa : Sebagian besar responden cukup dapat mengembangkan usahanya dengan lahan seluas 10 are 1 Ha. Apabila lahannya kurang dari 10 are responden tidak dapat membuka usaha baru karena terbatasnya lahan yang dimiliki. Dan dengan adanya lahan di atas 1 Ha kemungkinan cukup dapat membuka usaha baru. Jadi dapat disimpulkan ada pengaruh membuka usaha baru terhadap luas lahan yang dimiliki.

Dari tabel V.5 tersebut dapat dianalisa bahwa : Sebagian besar responden yang tingkatan pendapatannya 6-10% mempunyai fasilitas yang lengkap. Dan tingkatan pendapatan yang lebih dari 11% ada yang fasilitasnya lengkap dan ada juga yang kurang. Hal ini disebabkan kebutuhan-kebutuhan lain yang belum terpenuhi banyak. Atau responden tersebut mempunyai banyak hutang. Jadi keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membayar hutang. Jadi dapat di simpulkan ada pengaruh antara tingkatan pendapatan/ keuntungan terhadap fasilitas yang dimiliki.

## 5. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis nilai rata – rata prosentase variabel Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan yang diperoleh, termasuk kategori tinggi yaitu 78,64%.

Berdasarkan analisis nilai rata – rata prosentase variabel Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang diperoleh, termasuk kategori tinggi yaitu 68,3%.

Pengujian hipotesa yang dilakukan tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, karena  $r_h < r_t$  atau  $-0,0622 < 0,344$  ( 5% ) atau  $-0,0622 < 0,442$  ( 1% ). Hal ini dimungkinkan adanya variabel lain yang lebih dekat dengan keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan

## DAFTAR PUSTAKA

*Buku Monografi Desa*, Gundi, Desember 2011  
Edi Suharto, 2007 *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta,  
Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1990  
Singarimbun, Masri, Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta  
Sutrisno Hadi, 1983 *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta,

Tim Koordinasi, (*Petunjuk Teknis Operasional*) *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*, Jakarta.  
*PERDA No. 11 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*

## Lampiran

Tabel 1  
Sikap Pengelola dalam melayani Kegiatan SPP

| No | Sikap Pengelola | Frek | Persentase |
|----|-----------------|------|------------|
| 1  | Sangat Ramah    | 22   | 66,7%      |
| 2  | Cukup Ramah     | 11   | 33,3%      |
| 3  | Tidak Ramah     | -    | -          |
|    | Jumlah          | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.8

Tabel 2  
Sikap Pengelola pada saat anggota SPP Membayar angsuran

| No | Sikap Pengelola | Frek | Persentase |
|----|-----------------|------|------------|
| 1  | Cepat Tanggap   | 18   | 54,54%     |
| 2  | Cukup Tanggap   | 15   | 45,46%     |
| 3  | Tidak Tanggap   | -    | -          |
|    | Jumlah          | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No. 10

Tabel 3  
Penghasilan perbulan Sebelum Mendapatkan Pinjaman

| No | Penghasilan/bln         | Frek | Persentase |
|----|-------------------------|------|------------|
| 1  | >Rp 1.100.000           | 19   | 57,57%     |
| 2  | Rp 600.000-Rp 1.000.000 | 11   | 33,33%     |
| 3  | <Rp 500.000             | 3    | 9,1%       |
|    | Jumlah                  | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.13

Tabel 4  
Tingkatan pendapatan setelah mendapatkan Pinjaman

| No | Tingkatan/bln | Frek | Persentase |
|----|---------------|------|------------|
| 1  | >11%          | 12   | 36,36%     |
| 2  | 6% - 10%      | 15   | 45,45%     |
| 3  | <5%           | 6    | 18,19%     |
|    | Jumlah        | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.14

Tabel 5  
Modal Awal yang diberikan pada  
Anggota SPP

| No | Modal Awal                  | Frek | Persentase |
|----|-----------------------------|------|------------|
| 1  | >Rp 1.500.000               | 17   | 51,51%     |
| 2  | Rp1.000.000-<br>Rp1.450.000 | 16   | 48,49%     |
| 3  | <Rp 1.000.000               | -    | -          |
|    | Jumlah                      | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.15

Tabel 6  
Pengembangan Usaha dengan  
Pinjaman Modal dari SPP

| No | Pengembangan Usaha | Frek | Persentase |
|----|--------------------|------|------------|
| 1  | Sangat Dapat       | 30   | 90,90%     |
| 2  | Cukup Dapat        | 3    | 9,1%       |
| 3  | Tidak Dapat        | -    | -          |
|    | Jumlah             | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.17

Tabel 7  
Membuka Usaha baru dengan  
Pinjaman Modal dari SPP

| No | Membuka Usaha Baru | Frek | Persentase |
|----|--------------------|------|------------|
| 1  | Sangat Dapat       | 10   | 30,30%     |
| 2  | Cukup Dapat        | 23   | 69,70%     |
| 3  | Tidak Dapat        | -    | -          |
|    | Jumlah             | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.18

Tabel 8  
Menambah Karyawan Baru

| No | Menambah karyawan Baru | Frek | Persentase |
|----|------------------------|------|------------|
| 1  | Sangat Dapat           | -    | -          |
| 2  | Cukup Dapat            | 11   | 33,33%     |
| 3  | Tidak Dapat            | 22   | 66,67%     |
|    | Jumlah                 | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.19

Tabel 9  
Menambah barang Dagangan

| No | Menambah barang dagangan Baru | Frek | Persentase |
|----|-------------------------------|------|------------|
| 1  | Sangat Dapat                  | -    | -          |
| 2  | Cukup Dapat                   | 13   | 39,40%     |
| 3  | Tidak Dapat                   | 20   | 60,60%     |
|    | Jumlah                        | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.20

Tabel 10  
Berapa Lama tergabung menjadi Anggota SPP

| No | Lama Keanggotaan | Frek | Persentase |
|----|------------------|------|------------|
| 1  | 3-4 tahun        | 19   | 57,57%     |
| 2  | 1-2 tahun        | 10   | 30,30%     |
| 3  | Baru tahun ini   | 4    | 12,13%     |
|    | Jumlah           | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.23

Tabel 11  
Tunggakan Dalam membayar Angsuran

| No | Tunggakan dalam membayar angsuran | Frek | Persentase |
|----|-----------------------------------|------|------------|
| 1  | Tidak pernah                      | 28   | 84,84%     |
| 2  | Cukup pernah                      | 5    | 15,16%     |
| 3  | Sangat pernah                     | -    | -          |
|    | Jumlah                            | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.24

Tabel 12  
Sanksi apabila menunggak Membayar angsuran

| No | Sanksi apabila menunggak | Frek | Persentase |
|----|--------------------------|------|------------|
| 1  | Sangat ada               | 33   | 100%       |
| 2  | Cukup ada                | -    | -          |
| 3  | Tidak ada                | -    | -          |
|    | Jumlah                   | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.25

Tabel 13  
Ketepatan dalam membayar Angsuran

| No | Ketepatan waktu    | Frek | Persentase |
|----|--------------------|------|------------|
| 1  | Sangat tepat waktu | 26   | 78,78%     |
| 2  | Cukup tepat waktu  | 7    | 21,22%     |
| 3  | Tidak tepat waktu  | -    | -          |
|    | Jumlah             | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.26

Diketahui :

S = 1557 (Skor yang dicapai)

p = 20 (Jumlah item pertanyaan)

q = 33 (Jumlah Responden)

3 = Nilai skor tertinggi

$$\begin{aligned}
 &= \frac{S}{PXOX3} \times 100 \% \\
 &= \frac{1557}{20 \times 33 \times 3} \times 100 \% \\
 &= \frac{1557}{1980} \times 100 \% \\
 &= 78,64 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 14  
Bahan untuk membangun Rumah

| No | Bahan untuk membuat rumah | Frek | Persentase |
|----|---------------------------|------|------------|
| 1  | Batu                      | 28   | 84,84%     |
| 2  | Kayu                      | 5    | 15,16%     |
| 3  | Bambu                     | -    | -          |
|    | Jumlah                    | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.28

Tabel 15  
Bahan untuk Atap Rumah

| No | Bahan untuk atap rumah | Frek | Persentase |
|----|------------------------|------|------------|
| 1  | Genting press          | 28   | 84,84%     |
| 2  | Genting biasa          | 5    | 15,16%     |
| 3  | Seng                   | -    | -          |
|    | Jumlah                 | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.29

Tabel 16  
Bahan untuk membuat Dinding Rumah

| No | Bahan untuk dinding rumah | Frek | Persentase |
|----|---------------------------|------|------------|
| 1  | Tembok semua              | 1    | 3,04%      |
| 2  | Tembok dan papan          | 16   | 48,48%     |
| 3  | Papan                     | 16   | 48,48%     |
|    | Jumlah                    | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.30

Tabel 17  
Keadaan lantai

| No | Keadaan lantai | Frek | Persentase |
|----|----------------|------|------------|
| 1  | Keramik        | -    | -          |
| 2  | Tekel/ubin     | 24   | 72,72%     |
| 3  | Tanah          | 9    | 27,28%     |
|    | Jumlah         | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.31

Tabel 18  
Fasilitas Rumah

| No | Fasilitas Rumah | Frek | Persentase |
|----|-----------------|------|------------|
| 1  | Ada/lengkap     | 18   | 54,54%     |
| 2  | Kurang          | 15   | 45,46%     |
| 3  | Tidak ada       | -    | -          |
|    | Jumlah          | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.32

Tabel 19  
Keadaan TV di rumah

| No | Keadaan TV   | Frek | Persentase |
|----|--------------|------|------------|
| 1  | TV warna 21' | 11   | 33,33%     |
| 2  | TV warna 14' | 22   | 66,67%     |
| 3  | Tidak punya  | -    | -          |
|    | Jumlah       | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.33

Tabel 20  
Keadaan radio di rumah

| No | Keadaan radio    | Frek | Persentase |
|----|------------------|------|------------|
| 1  | Radio tape combo | 5    | 15,15%     |
| 2  | Radio tape       | 20   | 60,60%     |
| 3  | Tidak ada        | 8    | 24,25%     |
|    | Jumlah           | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.34

Tabel 21  
Pendapatan perbulan anggota SPP

| No | Pendapatan perbulan   | Frek | Persentase |
|----|-----------------------|------|------------|
| 1  | Rp 800.000 keatas     | 12   | 36,36%     |
| 2  | Rp 400.000-Rp 750.000 | 14   | 42,42%     |
| 3  | Rp 300.000 kebawah    | 7    | 21,22%     |
|    | Jumlah                | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.35

Tabel 22  
Luas lahan yang dimiliki Responden

| No | Luas lahan   | Frek | Persentase |
|----|--------------|------|------------|
| 1  | 1 ha keatas  | 3    | 9,09%      |
| 2  | 10 a – 1 ha  | 27   | 81,81%     |
| 3  | 10 a kebawah | 3    | 9,10%      |
|    | Jumlah       | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.36

Tabel 23  
Kepemilikan ternak

| No | Kepemilikan ternak | Frek | Persentase |
|----|--------------------|------|------------|
| 1  | 3 ekor sapi keatas | -    | -          |
| 2  | 1 ekor sapi        | -    | -          |
| 3  | 1 ekor ayam        | 33   | 100%       |
|    | Jumlah             | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.37

Tabel 24  
Kepemilikan Kendaraan

| No | Kepemilikan kendaraan | Frek | Persentase |
|----|-----------------------|------|------------|
| 1  | Mobil                 | -    | -          |
| 2  | Motor                 | 30   | 90,9%      |
| 3  | Sepeda                | 3    | 9,1%       |
|    | Jumlah                | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.38

Tabel 25  
Sarana Kesehatan yang di gunakan

| No | Sarana kesehatan | Frek | Persentase |
|----|------------------|------|------------|
| 1  | Rumah Sakit      | -    | -          |
| 2  | Mantri kesehatan | 33   | 100%       |
| 3  | Dukun            | -    | -          |
|    | Jumlah           | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.39

Tabel 26  
Pola makan

| No | Pola makan                    | Frek | Persentase |
|----|-------------------------------|------|------------|
| 1  | 3x sehari/beras/ daging       | -    | -          |
| 2  | 3x sehari/beras/ jagung/ ikan | 33   | 100%       |
| 3  | 2x sehari/jagung/ ikan teri   | -    | -          |
|    | Jumlah                        | 33   | 100%       |

Sumber : Diolah dari Pertanyaan No.40

Diketahui :

S = 879 (Skor yang dicapai)  
p = 13 (Jumlah item pertanyaan)  
q = 33 (Jumlah Responden)  
3 = Nilai skor tertinggi

$$\begin{aligned}
 &= \frac{S}{PXQX3} \times 100 \% \\
 &= \frac{879}{13 \times 33 \times 3} \times 100 \% \\
 &= \frac{879}{1287} \times 100 \% \\
 &= 68,3 \%
 \end{aligned}$$

Tabel V.1  
Pengaruh pendapatan sebelum mendapatkan  
Pinjaman terhadap Pola Makan keluarga

| No | Pola Makan (Y)               | Pendapatan sebelum pinjaman ( X ) |                   |           |           |
|----|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|    |                              | >Rp 1,1 jt                        | Rp 600rb -Rp 1 jt | <Rp 500rb | Jumlah    |
| 1. | 3x sehari/ beras/ daging     | -                                 | -                 | -         | -         |
| 2. | 3x sehari/beras /jagung/ikan | 19 (100%)                         | 11 (100%)         | 3 (100%)  | 33 (100%) |
| 3. | 2x sehari/jagung/ ikan teri  | -                                 | -                 | -         | -         |
|    | Jumlah                       | 19 (100%)                         | 11 ( 100%)        | 3 (100%)  | 33 (100%) |

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 13 dan no. 40



Tabel V.2  
Pengaruh Modal Awal yang diberikan kelompok SPP Terhadap Pola Makan keluarga

| No     | Pola Makan ( Y )              | Modal Awal yang diberikan kelompok SPP ( X ) |                     |            |           |
|--------|-------------------------------|--|---------------------|------------|-----------|
|        |                               | >Rp 1,5 juta                                 | Rp 1 jt - Rp1,45 jt | <Rp 1 juta | Jumlah    |
| 1.     | 3x sehari/beras/ daging       | -  | -                   | -          | -         |
| 2.     | 3x sehari/ beras/ jagung/ikan | 17 (100%)                                    | 16 (100%)           | -          | 33 (100%) |
| 3.     | 2x sehari/jagung/ ikan teri   | -  | -                   | -          | -         |
| Jumlah |                               | 17 (100%)                                    | 16 (100%)           | -          | 33 (100%) |

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 15 dan no. 40

Tabel V.3  
Pengaruh pengembangan usaha terhadap Pendapatan perbulan kelompok SPP

| No     | Pendapatan perbulan ( Y ) | Pengembangan Usaha ( X ) |             |             |             |
|--------|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|        |                           | Sangat dapat             | Cukup dapat | Tidak dapat | Jumlah      |
| 1.     | Rp 800.000 keatas         | 9 (30%)                  | 3 (100%)    | -           | 12 (36,36%) |
| 2.     | Rp 400.000 – Rp750.000    | 14 (46,66)               | -           | -           | 14 (42,42%) |
| 3.     | Rp 300.000 kebawah        | 7 (23,34%)               | -           | -           | 7 (21,22%)  |
| Jumlah |                           | 30 (100%)                | 3 (100%)    | -           | 33 (100%)   |

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 17 dan no. 35

Tabel V.4  
Pengaruh kelompok SPP dalam membuka usaha baru Terhadap kepemilikan lahan

| No     | Kepemilikan Lahan (Y) | Dalam membuka usaha baru ( X ) |             |             |             |
|--------|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|        |                       | Sangat dapat                   | Cukup dapat | Tidak dapat | Jumlah      |
| 1.     | 1 Ha keatas           | -                              | 2 (8,6%)    | -           | 2 (6,06%)   |
| 2.     | 10 are – 1 Ha         | -                              | 20 (86,95)  | 8 (80%)     | 28 (84,84%) |
| 3.     | < 10 are              | -                              | 1 (4,35)    | 2 (20%)     | 3 ( 9,1% )  |
| Jumlah |                       | -                              | 23 (100%)   | 10 (100%)   | 33 (100%)   |

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 18 dan no. 36

Tabel V.5  
Pengaruh Tingkatan Pendapatan terhadap Fasilitas yang dimiliki

| No     | Fasilitas yang dimiliki ( Y ) | Tingkatan pendapatan ( X ) |             |          |             |
|--------|-------------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------------|
|        |                               | >11%                       | 6% -10%     | <5%      | Jumlah      |
| 1.     | Ada/lengkap                   | 6 (50%)                    | 10 (66,67%) | 6 (100%) | 22 ( 66,67) |
| 2.     | Kurang                        | 6 (50%)                    | 5 (33,33%)  | -        | 11 (33,33%) |
| 3.     | Tidak ada                     | -                          | -           | -        | -           |
| Jumlah |                               | 12 (100%)                  | 15 (100%)   | 6 (100%) | 33 (100%)   |

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 14 dan no. 32